

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Warta Kota |

Pengadaan Mobil Dinas Kurang Tepat

Palmerah, Warta Kota

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai rencana pengadaan mobil dinas untuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kurang tepat.

Salah satu alasannya karena Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengantisipasi resesi ekonomi. "Karena timing-nya juga tak tepat di saat bangsa ini sedang menghadapi untukantisipasi resesi ekonomi. Kalau kita kaitkan momentumnya tidak pas," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Dengan demikian, Fraksi PDI-P mendorong agar anggaran untuk pembelian mobil dinas dialihkan.

Terlebih, ia yakin Heru Budi tidak akan menggunakan mobil dinas tersebut. Namun, Gembong pun mengembalikan soal dorongan pengalihan anggaran pembelian mobil dinas tersebut kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

"Iya (untuk tidak dianggarkan) tapi tanyakan dulu ke Pak Heru. Saya punya keyakinan beliau tidak akan menggunakan. Ketika beliau tidak menggunakan itu berarti alokasi anggaran bisa digeser," ucap Gembong.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jenis jip sebagai kendaraan dinas Heru Budi.

Belanja kendaraan itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP LKPP).

Belum Punya Kendaraan Dinas

Sementara itu Heru angkat suara terkait polemik rencana pengadaan mobil dinas untuk dirinya.

Heru mengaku selama ini ia masih menggunakan mobil dinas yang berasal dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Saya masih belum ada kendaraan,

Masih pakai kendaraan jabatan saya di Setpres (Sekretariat Presiden)," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Diketahui, kendaraan dinas yang selama ini dipakai Heru adalah mobil dengan jenis Innova Venturer berwarna hitam.

Saat ditanya rencana waktu atau deadline pengadaan kendaraan dinas dirinya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru mengaku masih belum mengetahui.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjelaskan urgensi pengadaan mobil dinas untuk Heru.

Joko mengaku bahwa pengadaan atau pergantian tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

"Jadi gini, ada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur tentang itu," ujar Joko saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Diketahui, PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

"Bahwa kepala daerah yang menjabat lebih dari 4 tahun diperbolehkan untuk mengambil alih kendaraan itu, tetapi tidak gratis ya," jelas Joko. ([m32/Kompas.com](https://www.kompas.com))